



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini, Hari **Kamis** Tanggal **26** Bulan **Februari** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Rezha Pranatama, SE., MM., M.Sc	197602022006051001	Kasubdit Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri
2	Budiyono, SKM	198907192024211016	Perencana Ahli Pertama	Kemen PPN/Bappenas
3	Rizky Surya Triadi, SH., M.Si	198201192006041002	Perencana Ahli Madya	Kemendukbangga/BKKBN
4	Wilna Silvany, SE	198804072011012003	Plt. Kabid Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas P3APPKB Prov. Kalimantan Tengah
5	HARMITA, S.K.M., M.M	197702071999032003	Perencana Ahli Muda	Bapperida Prov. Kalteng

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	67.5	62.74:62.76	
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	85.9	89.2	
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.14.03.1.01.0014	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Melalui Mitra Kerja	Laporan / Dokumen	1



Catatan Pembahasan : 1. Bappeda menyampaikan bahwa di renstra OPD sudah ada subkegiatan dengan kode yang berbeda.					
2. Bappenas dan Kemendukbangga berharap daerah bisa mengakomodir sub kegiatan ini dalam RKPD 2027.					
3. Diharapkan DP3APPKB provinsi Kalimantan Tengah dapat berkoordinasi aktif dengan BKKBN Perwakilan di Provinsi Kalimantan Tengah membahas target secara teknis dilapangan, agar dapat di laksanakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.					
4. Dinas terkait dapat berkoordinasi dengan Bappeda untuk pelaksanaan kegiatan ini.					
2.	2.14.03.1.02.00 08	Peningkatan Kesertaan KB Pascapersalinan	Jumlah kesertaan KB Pascapersalinan	Laporan / Dokumen	1
Catatan Pembahasan : 1. Bappenas dan Kemendukbangga berharap sub kegiatan ini dapat di akomodir di RKPD 2027.					
2. OPD akan melakukan penyesuaian terhadap sub kegiatan ini dengan berkoordinasi dengan Bappeda.					
3.Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk advokasi untuk mendukung kebijakan terkait KBPP					

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.14.04.1.01.00 36	Fasilitasi pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang mendapat pembinaan	Kelompok	1
Catatan Pembahasan : 1. OPD menyampaikan sub kegiatannya ini sudah ada pada usulan RKPD 2027, namun belum ada alokasi anggaran dan targetnya.					
2. Disepakati untuk pemantik target sebesar 1 kelompok.					
2.	2.14.04.1.02.00 10	Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Laporan	1
Catatan Pembahasan : 1. OPD menyampaikan bahwa sub kegiatan ini sudah ada pada usulan RKPD 2027, dengan bentuk kegiatan berupa koordinasi sebanyak 1 kegiatan.					
2. Kemendukbangga dan Bappenas menyepakati target sesuai usulan OPD KB					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP	Orang	2879517
2.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon	Lembaga	22105
3.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang KBKR	Kabupaten/Kota	508
4.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Fasilitasi dan pembinaan fasilitas kesehatan yang siap melakukan pelayanan KB	Faskes	22105
5.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan KB Pascapersalinan, pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan	Kabupaten/Kota	508
6.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan peningkatan Peserta KB Aktif penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Kabupaten/Kota	508



NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
7.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas Penggarapan Pelayanan KB Wilayah Khusus	Kabupaten/Kota	206
8.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan dalam bidang pergerakan dan peran serta masyarakat	Kabupaten/Kota	508
9.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pemerintah daerah yang melaksanakan promosi Program bangga kencana melalui media lini bawah oleh pengelola program, petugas dan kader	Provinsi	37
10.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pengelolaan Sistem dan informasi keluarga yang berkualitas	Sistem Informasi	32
11.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Kabupaten/Kota	508
12.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Laporan	37
13.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	SDM Eksternal yang mendapatkan pelatihan Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana tingkat provinsi	Orang	1016
14.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitas Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA)	Kabupaten/Kota	508
15.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang pembangunan keluarga	Kabupaten/Kota	508
16.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Keluarga yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK	Keluarga	7976954
17.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitas dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja	Kelompok Masyarakat	34289

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN



Ada 9 Indikator pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Namun hanya 2 indikator yang menjadi kesepakatan untuk dimasukkan ke dalam RKPD 2027 yaitu :

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga): Capaian 2025 sebesar 67,9, Target 2025 sebesar 64,4, Target 2026 sebesar 66,1, Target 2027 sebesar 67,8.

Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Mix antara unmetneed dan Mcpr): Capaian 2025 sebesar 90,0, Target 2025 sebesar 89,30, Target 2026 sebesar 89,76, Target 2027 sebesar 90,22.

Berikutnya untuk indikator lainnya, diharapkan daerah dapat menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun): Capaian 2025 sebesar 2,22, Target 2025 sebesar 2,23, Target 2026 sebesar 2,22, Target 2027 sebesar 2,21.

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK): Capaian 2025 sebesar 55,9, Target 2025 sebesar 64,5, Target 2026 sebesar 65,4, Target 2027 sebesar 66,3.

Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD): Capaian 2025 sebesar 11,0, Target 2025 sebesar 8,18, Target 2026 sebesar 8,08, Target 2027 sebesar 7,99.

Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) { Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun }: Capaian 2025 sebesar 38,9, Target 2025 sebesar 37,96, Target 2026 sebesar 37,79, Target 2027 sebesar 37,62.

Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja: Capaian 2025 sebesar 81,5, Target 2025 sebesar 85,86, Target 2026 sebesar 86,88, Target 2027 sebesar 87,83.

Indeks Lansia Berdaya: Capaian 2025 sebesar 69,9, Target 2025 sebesar 58,65, Target 2026 sebesar 59,15, Target 2027 sebesar 59,65.

Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri: Capaian 2025 sebesar 23,93, Target 2025 sebesar 23,71, Target 2026 sebesar 28,71, Target 2027 sebesar 33,71.

VI PENUTUP

1. JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	1
2. JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3. JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4. JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5. JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6. JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	17

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.